

**EFEKTIFITAS STRATEGI INDONESIA DALAM MENANGANI
ILLEGAL FISHING OLEH KAPAL NELAYAN ASING DI KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS – PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN
2011-2014**

Hamdan Dani*

Email : Hammdannndani92@yahoo.co.id

Supervisor
Aprizal, S.IP, MA

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Panam Pekanbaru. 28293
Telp / fax : 0761 - 63277

Abstract

This research is intended to review Indonesia strategy effectiveness in handling illegal fishing that happen in Anambas Sea. Anambas is a regency which locate in South China Sea at the west side of Indonesia. The regency of Anambas Islands is a “fish managing area” (WPP 711) that has estimated fishing around 1 million ton/year. Strategic position and Anambas potential in the other side has a risk with illegal fishing activity. Indonesia has tried to handle illegal fishing at this location with patrol activity by government institution like TNI-AL, DKP Anambas, Satker PSDKP Anambas and built monitoring post also engaging society. Clausewitz said a strategy as a form of engagements of war objective.

Describing this phenomenon with using qualitative method with descriptive-analysis research. Using 2 kind of data, primary and secondary data. Primary data is obtained from interview with witness, informant, and institution, and secondary data is obtained from library research with document and media. Theory in this research is using strategy theory. Strategy is capability to use power as instrument and threat. Clausewitz said a strategy as a form of engagements of war objective. To understand effectiveness of military strategy with using political effectiveness approach and also strategy effectiveness. Relevant perspective in this research is realist perspective with security and sovereignty theme. Level of analysis is nation-state, state is a dominant a dominant actor in international activity.

The result of this research is Indonesia strategy in handling illegal fishing at Anambas sea is not an effective strategy because the monitoring complexity of illegal fishing at Anambas.

Keywords : *Effectivity, Strategy, Security, Illegal Fishing and Anambas*

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektifitas strategi Indonesia dalam menangani tindak *Illegal fishing* yang terjadi di kawasan laut Anambas – Provinsi Kepulauan Riau. *Illegal fishing* atau sering disebut dalam dunia internasional dengan *IUU Fishing* adalah salah satu bentuk ancaman yang di hadapi negara karna dapat mengganggu kedaulatan dan keamanan serta merugikan negara.

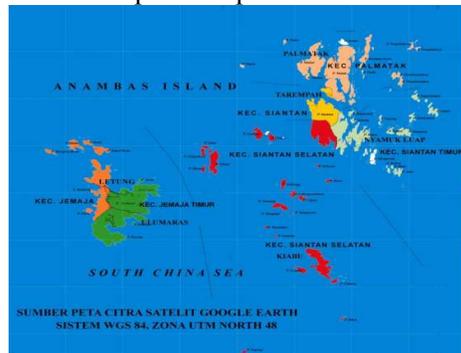
Food and Agriculture Organizations (FAO) menjelaskan *IUU Fishing* kedalam tiga terminologi¹ : *Illegal Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di perairan wilayah atau ZEE suatu negara dengan tidak memiliki izin dari negara pantai. *Illegal Unreported* adalah kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data hasil tangkap, hasil tangkapan yang langsung di bawa ke negara lain di tengah laut. Dan *Illegal Unregulated* adalah kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut seperti penggunaan alat tangkap yang sudah di modifikasi dan merusak lingkungan laut (Trawl, pukot harimau, pukot mayang, pukot cincin, dan bom).

¹ Trumen Viktor, 2013. *Kebijakan pemerintahan Indonesia Menangani Dampak (Illegal Fishing) Nelayan Malaysia Terhadap Produksi Perikanan Indonesia 2007-2011*. Pekanbaru: Universitas Riau. Hal. 11. Juga tersedia di : <http://www.jasavote.com/2012/07/makalah-kelautan-indonesia.html>.

Kabupaten Kepulauan Anambas yang kemudian disingkat KKA terbentuk melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2008 tanggal 24 Juni 2008. Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Siantan, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur dan kecamatan siantan tengah.

Gambar 1.1

Peta Kabupaten kepulauan Anambas



Sumber : Peta Citra Satelit Google Earth Sistem WGS 84, Zona UTM North 48.

Kabupaten Kepulauan Anambas terletak di laut China Selatan bagian barat Indonesia dan berbatasan dengan empat negara asing yakni Malaysia, Vietnam, Kamboja dan Thailand. KKA yang berbatasan langsung dengan negara tetangga ini sangat rentan dengan pelanggaran wilayah yang dapat mengganggu kedaulatan dan merugikan negara jika tidak di jaga dan diamankan. Wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Anambas dapat di lihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.2
Peta Batas Wilayah Kabupaten
Kepulauan Anambas.



Sumber : Anambaskap.go.id.

Kabupaten Kepulauan Anambas terletak di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP 711) yang memiliki estimasi perikanan tangkap sekitar 1 juta ton/tahun. Khusus potensi sumber daya perikanan dan kelautan di perairan Kabupaten Kepulauan Anambas dari data sumber daya ikan mencapai 88.792,20 ton/tahun. Sedangkan dari survei yang dilakukan *Seafdec* dugaan potensi disekitar Perairan Kabupaten Kepulauan Anambas mencapai 70.923,37 ton/tahun.² Letak yang strategis dan potensi yang dimiliki Anambas, membuat kawasan laut Anambas rentan terhadap pelanggaran wilayah kedaulatan Indonesia dan penangkapan ikan secara ilegal (*IUU Fishing*) oleh kapal nelayan asing.

Untuk mengkaji permasalahan di atas di gunakan pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Untuk mendapatkan gambaran yang komperhensif dan holistik dari penelitian ini, digunakan dua jenis

data yakni data primer dan data skunder. Data primer di peroleh dari wawancara dengan berbagai pihak, baik saksi atau masyarakat serta instansi terkait, dan observasi langsung di lokasi. Sedangkan data skunder di peroleh dengan melakukan kajian literatur kepustakaan, dokumen dan bahan yang terkait lainnya.

Dalam rangka memberikan fokus yang lebih tajam terhadap permasalahan yang dibahas, maka peneliti menetapkan batasan waktu yang harus di teliti, yaitu antara tahun 2011-2014, dimanan pada masa itu adanya tindakan *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal nelayan asing yang telah mengakibatkan ketidakamanan kawasan laut Anambas bagi masyarakat, dan telah merugikan negara.

Sebagai kerangka acuan dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan perspektif realis dengan tema keamanan dan kedaulatan. Keamanan menurut perspektif realis dalam hubungan internasional terkait tentang negara, sebuah negara akan aman apabila dapat memastikan keberlangsungan hidupnya dalam sistem internasional.³ Konsep keamanan nasional mengacu pada situasi atau keadaan dimana unsur-unsur pokok yang membentuk suatu negara seperti kedaulatan, wilayah, penduduk, atau warga negara, basis ekonomi, pemerintahan dan sistem konstitusi serta nilai-nilai hakiki yang dianutnya terjamin eksistensinya dan dapat menjalankan fungsi sesuai tujuannya tanpa

² Dinas Kelautan dan perikanan Kepulauan Riau. Dapat di akses pada website resmi DKP KEPRI : DKP.KEPRI.co.id.

³ Jill, S., & Lloyd, P., 2009. *Hubungan Internasional Perspektif dan Tema*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. hal.69.

gangguan atau ancaman dari pihak manapun.

Sedangkan kedaulatan dalam pandangan perspektif realis merupakan karakteristik utama negara yang di dalam literatur hubungan internasional kedaulatan di artikan sebagai otoritas atau kekuasaan negara tertinggi yang tunduk kepada batasan-batasan eksternal atau kemampuan suatu negara melalui pemerintahannya untuk menjadi penguasa di negaranya dalam mengontrol kehidupan domestik dan dalam hubungan-hubungan luar negerinya mempunyai kemampuan untuk mempertahankan kepentingan di dalam negerinya secara maksimal.⁴

Tingkat analisis yang digunakan adalah negara bangsa (*Nation State*) dengan alasan bahwa objek utama dalam hubungan internasional adalah perilaku negara bangsa. Dengan asumsi bahwa semua pembuat keputusan, dimanapun berada, pada hakikatnya akan berperilaku sama apabila menghadapi situasi yang sama. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori strategi. Strategi merupakan kamanpuan untuk menggunakan kekuatan sebagai alat dan sebagai ancaman. Dilihat dari kajian kekuatan militer, strategis menjadi jembatan antara kekuatan militer tersebut dengan pencapaian tujuan politik. Untuk menentukan efektifitas strategi militer yang digunakan sebuah negara/pemerintah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan efektifitas

politik dan efektifitas strategi itu sendiri.

Dalam kasus *illegal fishing* yang terjadi di kawasan laut Anambas, Strategi yang digunakan adalah patroli pengawasan yang dilakukan oleh beberapa lembaga seperti Bakorkamla, TNI-AL (Lanal Tarempa), Satker PSDKP Anambas, dan DKP Anambas. membangun pos pengawasan dan melibatkan masyarakat nelayan Anambas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) adalah sebuah kabupaten yang terletak di Laut China Selatan yang berada di bawah wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Riau. Secara geografis KKA berada pada posisi 2^o10'0"-3^o40'0"LU s/d 105^o15'0"-106^o45'0" BT. Sebagai kabupaten maritim wilayah Anambas meliputi banyak pulau, terdiri dari 255 pulau, 26 pulau telah berpenghuni dan 5 pulau merupakan pulau terluar. Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai kabupaten yang berbentuk pulau-pulau kecil, memiliki total luas wilayah 46.664,14km². Dengan luas laut 46.029,77 km² atau 98,65% dan luas daratan 634,37 km² atau 1,35% dari total luas wilayah.

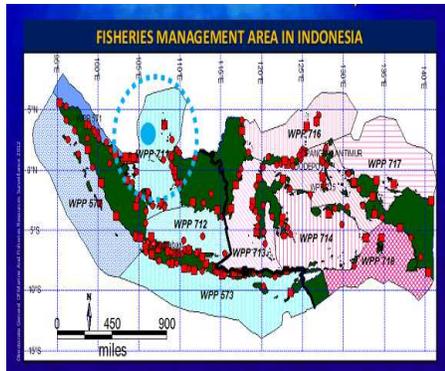
Kondisi lautan yang dimiliki KKA tersebut membuatnya banyak menyimpan potensi kelautan dan perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.⁵ Kabupaten Kepulauan

⁴ Theodore, A.C., & James, W., 1999. *Pengantar Hubungan Internasional Keadilan dan Power*. Bandung: Putra Abardin. hal. 77

⁵ Kabupaten Kepulauan anambas, 2014. *Gerbang Perak Menuju Mas*. (PDF). Hal 68. Tersedia di : <http://parekraf.go.id/%2Foldlook%2Fattachments%2F24-2078381286-0.pdf&ei=xyxXVIO0DM-zuAS-koLgAQ&usq=AFQjCNEWS5HHpE6vZCmWrgvzxw1GEm-0rg>.

Anambas terletak di wilayah pengelolaan perikanan (WPP 711) dengan estimasi potensi perikanan 1 juta ton/tahun dan merupakan WPP yang paling besar potensinya dibandingkan dengan WPP lainnya. Peta wilayah pengelolaan perikanan (WPP 711) Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada gambar dibawah.

Gambar 2.2
Peta wilayah pengelolaan perikanan (WPP 711) Kabupaten Kepulauan Anambas.



Sumber : Kabupaten Kepulauan Anambas “Gerbang Perak Menuju Mas”.

Di lihat dari peta di atas, wilayah pengelolaan perikanan (WPP 711) yang paling memiliki lokasi yang strategis, di mana letaknya berbatasan dengan beberapa negara asing Seperti Thailand, Vietnam, Malaysia dan Singapura, ditambah dengan potensinya yang besar. Potensi perikanan tangkap yang tersebar di wilayah pengelolaan perikanan (WPP). Sebagai perbandingan, WPP 711 (Laut China Selatan) memiliki potensi yang tertinggi yaitu 1,05 juta ton/tahun, di ikuti WPP 713 (Selat Makasar Laut Plores) 0,92 juta ton/tahun, dan WPP 718 (Laut Arafura – Laut Tomor) sebesar 0,85 juta ton/tahun. Secara

lengkap estimasi potensi sumber daya ikan ini di sajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Estimasi potensi sumber daya ikan pada masing-masing WPP-RI (dalam ribuan ton/tahun)

Kategori Sumber Daya Ikan	Potensi Pada Masing-Masing Wilayah Pengelolaan Perikanan										Total
	Selat Malaka	S. Hindia	Laut China Selatan	Laut Jawa	Selat Makasar Laut Flores	Laut Banda	Teluk Tomini, Laut Seram	Laut Sulawesi	S. Pasifik	Laut Arafura Laut Timor	
Ikan pelagis besar	27.7	164.8	66.1	55.0	193.6	104.1	106.6	70.1	10.2	50.9	1.145.4
Ikan pelagis kecil	147.3	313.9	621.5	300.0	605.4	132.0	379.4	320.9	153.9	468.7	3.645.7
Ikan Demersial	82.4	68.9	334.8	375.2	87.2	9.3	88.8	24.7	30.2	28.7	1.432.3
Udang Penaeid	11.4	4.8	11.9	11.4	4.8	-	0.9	1.1	1.4	44.7	98.3
Ikan karang komersial	5.0	8.4	21.6	9.5	34.1	32.1	12.5	6.5	8.0	3.1	143.3
Lobster	0.4	0.6	0.4	0.5	0.7	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	4.8
Cum-cumi	1.9	1.7	2.7	5.0	3.9	0.1	7.1	0.2	0.2	3.4	28.3
Total Potensi	276.0	565.2	1.039.0	836.6	929.7	278.0	595.6	333.6	299.1	835.5	6.520.1

Sumber : Keputusan Menteri Kelautan Dan perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.45/MEN/2011 Tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan negara Republik Indonesia.

Potensi sumber daya perikanan dan kelautan khusus di Perairan Kabupaten Kepulauan Anambas dari data sumber daya ikan mencapai 88.792,20 ton/tahun. Sedangkan dari survei yang dilakukan *Seafdec* dugaan potensi disekitar Perairan Kabupaten Kepulauan Anambas mencapai 70.923,37 ton/tahun. Dengan jenis sumber daya ikan yang paling potensi yaitu ikan pelagis kecil dan di ikuti jenis ikan damersial. Ikan pelagis besar menduduki potensi terbanyak ketiga, diikuti dengan ikan karang dan ikan-ikan yang lainnya. Secara lengkap data potensi sumber daya ikan KKA dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Potensi sumberdaya ikan di perairan
Kabupaten Kepulauan Anambas

Jenis Sumber Daya Ikan	Stok WPP 711 SDI, 2010		Kajian Seafdec 2006	
	Estimasi Potensi Kepri (Ton/Tahun)	Potensi Kep. Anambas (Ton/Tahun)	Estimasi Potensi Kepri (Ton/Tahun)	Potensi Kep. Anambas (Ton/Tahun)
Ikan Pelagis Besar	53.802,34	5.550,72	16.483,29	1.695,89
Ikan Pelagis Kecil	506.025,30	52.206,00	146.309,34	15.053,36
Ikan Damersial	272.594,16	28.123,20	491.653,06	50.583,79
Ikan Karang	17.562,29	1.811,88	Tt	Tt
Lainya (Cumi-cumi, Udang, Lobster)	10.666,02	1.100,40	Tt	Tt
Krustase (Udang, Kepiting, Rajungan, Lobster, Mantis)			4.402,70	452,74
Moluska (Cumi-cumi, Sotong, Gurita)			30.496,77	3.137,66
Total	860.650,11	88.792,20	689.345,17	70.923,37

*) Evaluasi Data Komnaskajiskan, 2010 terkoreksi

**) Dugaan Kajian Seafdec, 2006

Sumber : DKP-KEPRI

Keterangan dari tabel 2.5, kelompok ikan pelagis besar (ikan tongkol krai dan tenggiri), pelagis kecil (ikan teri, selar, kembung dan tembang), Damersial (swangi, kurisi, belanak), ikan karang (kakap merah/bambangan, barongan dan kerapu karang), krustase (kepiting dan rajungan, lobster, dan udang) dan kelompok moluska (cumi-cumi, sotong dan gurita).

Berdasarkan, letaknya yang strategis yang terletak di Laut China Selatan, berbatasan langsung dengan beberapa negara asing, dan potensi perikanan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 711 telah menjadikan perikanan KKA sebagai daya tarik bagi nelayan-nelayan tangkap dari negara-negara asing terutama negara Thailand, Vietnam dan Malaysia, maupun nelayan dari daerah lain di Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal fishing*) di kawasan laut Anambas. Kapal-kapal nelayan asing tersebut biasanya dilengkapi dengan peralatan yang canggih,

seperti radar pendeteksi keberadaan ikan di bawah laut, alat tangkap berupa Trawl, pukut mayang, pukut hariamau, pukut cincin bahkan ada kapal yang menggunakan bom yang dapat merusak lingkungan laut. Kapal-kapal nelayan asing diatas mampu mengeruk 2000 ton ikan perminggu sehingga di taksir kerugian negara dari praktek *illegal fishing* di kawasan laut Anambas mencapai 1 triliun pertahun.

Beberapa pelanggaran penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal fishing*) oleh kapal nelayan asing di perbatasan laut KKA diantaranya; Saksi yang diberitakan oleh nelayan Anambas yang sering melihat di laut sejauh 5 mil dari pantai adanya aktifitas kapal nelayan asing yang beropersai menangkap ikan dengan menggunakan pukut mayang.⁶

Pelanggaran penangkapan ikan secara ilegal oleh nelayan kapal asing ini bukanlah sesuatu hal yang baru terjadi. Diceritakan oleh para tokoh masyarakat Anambas, dahulu banyak nelayan kapal asing yang mencuri ikan di kawasan Laut Anambas, tidak hanya mencuri ikan tetapi mereka juga menjarah kepulauan dan mengambil hasil perkebunan masyarakat Anambas, para perempuan kita diperkosa.

Saat peneliti masih menetap dan tinggal di salah satu kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas dahulunya masih bergabung dengan Kabupaten Natuna, peneliti pernah melihat tiga buah kapal nelayan asing (kapal nelayan Thailand) yang berhasil ditangkap oleh warga sekitar, kemudian dua diantaranya di

⁶ Haratua, S., 2014. Nelayan Tuntut Ketegasan Pemerintahan, *Haluan Kepri*, 25 juni hal. 20.

bakar dan satunya dilepaskan untuk dipulangkan ke negaranya dengan membawa semua anak buah kapal (ABK) nelayan dari tiga kapal tersebut. Aksi pembakaran tersebut merupakan bentuk tindakan atas pelanggaran kedaulatan Indonesia yang telah meresahkan masyarakat Anambas. Kerangka kapal asing yang dibakar dan ditenggelamkan tersebut sampai sekarang masih ada dan telah menjadi tempat bagi ikan-ikan kecil. kerangka kapal nelayan Tahiland yang telah di bakar dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.3
Rangka kapal Thailand



Sumber : Koleksi pribadi, Hamdan Dani

Tarmizi, Ketua Ikatan Kerukunan Nelayan Kepulauan Anambas, pernah mengungkapkan dari sebelum terbentuknya Kabupaten Kepulauan Anambas sampai tahun 2009 setidaknya ada 24 kapal asing telah berhasil di tangkap di kabupaten kepulauan anambas⁷ dan khusus tahun 2010 DKP KKA berhasil menangkap 9 kapal asing yang melakukan *illegal fising* di

⁷ Ferry Santoso, 2009. KEPRI, Ladang Empuk Eksploitasi Alam. *Infokorupsi.com*. 14 Agustus. <http://infokorupsi.com/id/apbn-apbd.php?ac=beritai=545&d=85>. (diakses pada 3 november 2014).

wilayah laut KKA.⁸ Sedangkan berdasarkan data rekapitulasi tindak pidana perikanan di Anambas 2006 - 2010 tercatat pelanggaran penangkapan ikan ilegal yang terjadi di kawasan laut Anambas sebanyak 50 kasus. Secara lengkap Rekapitulasi tindak pidana perikanan di Anambas 2006 – 2010 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.6
Rekapitulasi Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Hukum Perairan Kabupaten Kepulauan Anambas 2006-2010.

No	Tahun	Total Tindak Pidana	Bendera	Sumber Data
1.	2006	2 Kasus	Thailand	Satker PSDKP Tarempa
2.	2007	25 Kasus	Thailand = 13 Vietnam = 12	Satker PSDKP Tarempa
3.	2008	5 Kasus	Indonesia	Satker PSDKP Tarempa
4.	2009	9 Kasus	Malaysia = 7 Thailand = 9	Satker PSDKP Tarempa
5.	2010	9 Kasus	Thailand = 7 Vietnam = 2	Satker PSDKP Tarempa

Sumber : DKP Anambas.⁹

Modus penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal nelayan asing diantara dengan melakukan penangkapan ikan tanpa izin, menggunakan izin palsu, menggunakan alat tangkap yang dilarang, menangkap jenis ikan yang tidak sesuai izin, penangkapan ikan di wilayah yang tidak sesuai izin, tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan

⁸ Berita daerah, 2010. Lawan KRI kapal nelayan Thailand tenggelam. *JPNN*, 12 mei. Tersedia di : jpn.com/news.php?id=63709. (di akses pada 13 oktober 2014).

⁹ Peneliti dapatkan dari DKP Anambas Saat melakukan penelitian di lapangan. Lengkapnya terlampir.

data hasil tangkapan, dan membawa hasil tangkapan langsung ke negara asal (*Transhipmen*).

Dalam memerangi praktek *illegal fishing* pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan tindakan baik ditingkat nasional maupun internasional, di tingkat internasional pemerintahan Indonesia terus menjalin kerja sama dengan negara-negara yang memiliki perbatasan laut dalam mewujudkan praktek penangkapan ikan yang bertanggung jawab dan memerangi *illegal fishing*. salah satu kerja sama yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia dalam memerangi tindak *illegal fishing* yakni kerja sama Indonesia, Singapura dan Malaysia. Kerja sama ini berbentuk patroli terkoordinasi di mana masing-masing negara akan memberikan informasi tentang kejadian yang terjadi di negara anggota. Di tingkat nasional, khususnya di kawasan laut Anambas Indonesia melakukan pengawasan keamanan laut dengan meningkatkan patroli baik melalui Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA), TNI-AL, Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Anambas, membangun pos pengawasan, serta melibatkan masyarakat.

Hasil penelitian ini, strategi yang digunakan Indonesia dalam menangani *illegal fishing* tersebut belum efektif karna kompleksitas permasalahan pengawasan *illegal fishing* di Anambas. Belum efektifnya strategi yang dilakukan oleh Indonesia ini dapat dilihat pada pelanggaran *illegal fishing* oleh kapal nelayan asing yang masih terjadi di kawasan laut Anambas (Terampir).

juga dapat dilihat dari keadaan keamanan Anambas yang belum meningkat, seperti; masuknya kapal perang asing dan pembajakan. Masuknya kapal perang asing terutama kapal perang Amerika Serikat, Singapura dan Malaysia yang memiliki basis di Singapura. Mereka sering melintasi atau memasuki daerah kedaulatan Indonesia, kapal perang tersebut sering mengadakan latihan dan mengambil wilayah yang di akui sebagai Alur Laut kepulauan Indonesia (AKLI). Pembajakan, Indikasi pembajakan masih ada di perairan Anambas dapat di lihat pada kasus yakni, adanya sebuah kapal tanker bernama MT Galuh Pusaka yang di temukan di daerah laut Anambas. Kapal tangker tersebut di temukan oleh kapal patroli TNI-AL Kal Baruk, Pada hari rabu tanggal 18 juni 2014 pukul 04.05 WIB di posisi 03 49 15 U-106 33 20 T dekat pulau tokong belayar kawasan laut Anambas. di temukan tanpa awak terhanyut mengikuti arus, yang diduga sebagai korban dari pembajakan.¹⁰ Dari fenomena yang terjadi tersebut akhirnya membuat masyarakat Anambas tidak aman, atau mengakibatkan belum sejahteranya masyarakat Anambas terutama para nelayan Anambas.

Faktor-faktor yang mengakibatkan belum efektifnya strategi Indonesia dalam menangani *illegal fishing* yang terjadi di kawasan laut Anambas diantaranya, ketersediaan anggaran, dimana jumlah ketersediaan anggaran yang di miliki akan berpengaruh terhadap ketersediaan BBM dan jumlah hari patroli yang dilakukan setiap bulannya. jumlah hari patroli yang

¹⁰ Haratua, 2014. MT Galuh Pasukan Dibajak. *Haluan Kepri*.

dilakukan oleh DKP KKA pada tahun 2013, 10 hari/bulan dan pada tahun 2014, 5 hari/bulan, kemudian setelah adanya perubahan APBD jumlah hari patroli hanya 3 hari/bulannya.

Sarana dan prasarana, dilihat dari jumlah kapal pengawas yang tersedia untuk melakukan pengawasan, saat ini TNI-AL (Lanal Tarempa) hanya memiliki 5 buah kapal pengawas. Masing-masing kapal tersebut adalah kapal patroli yang bernama Kalbaruk, yang merupakan andalan utama, kemudian Patkamla Nusa, Patkamla Benoa, Patkamla Tarempa dan Patkamla Serasan ditambah dengan "sea rider" dari Bakorkamla. "Khusus Patkamla Serasan sudah rusak, diganti dengan Patkamla Siantan. Tapi statusnya juga masih pinjam pakai dari pemerintah daerah."¹¹

Dari lima kapal patroli yang dimiliki oleh pangkalan AL di Tarempa hanya satu kapal yaitu kapal Angkatan Laut (KAL) Baruk yang dilengkapi dengan senjata jenis 12,7 mitraliur Buatan tahun 1992, KAL Baruk terbuat dari Fiber, bukan besi atau aluminium yang menjadi standar alusista kapal daerah perbatasan.

Sedangkan dari DKP Anambas hanya memiliki satu buah kapal pengawas yang bernama Ketipas. kapal inilah yang di gunakan untuk melakukan patroli oleh DKP Anambas. Kapal pengawas ketipas tersebut merupakan kapal pribadi yang ribahkan ke DKP Anambas,

KP.Ketipas ini terbuat dari viber yang dimana masa efektifnya untuk berlayar hanya 4 tahun. Sampai tahun 2014 ini KP.Ketipas sudah berusia sekitar 10 tahun. Seharusnya KP.Ketipas ini sudah tidak beroperasi lagi di laut untuk melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Anambas, namun apakah yang bisa dilakukan oleh DKP Anambas untuk patroli tanpa KP.Ketipas.

Selain jumlah armada ini, sarana lain juga tidak dimiliki pemerintah Anambas, yakni radar pantai. Teknologi ini penting untuk mengetahui adanya kapal ikan asing yang masuk ke perairan Indonesia terkhusus di kawasan laut Anambas. Oleh karna itu, untuk menekan aksi penangkapan ikan secara ilegal oleh nelayan kapal asing di wilayah laut Anambas perlu adanya penambahan terhadap Kapal Pengawas beserta kelengkapan senjata dan personilnya. kemudian juga harus di tingkatkan koordinasi antar lintas sektor pengawasan kelautan.

Kondisi Alam Jaringan Komunikasi, dan Lainnya. Kondisi alam merupakan salah satu yang menjadi penghambat pemberantasan *illegal fishing* yang terjadi di laut anambas. kondisi yang sangat menghambat yakni saat musim utara dan barat di mana saat itu gelombang tinggi mencapai 5 meter dan angin kencang. Selain kondisi alam, di sebagian wilayah anambas jaringan sangatlah sulit untuk di dapatkan, misalnya di desa Kuala Maras (Jemaja timur), disana ada tower namun tidak ada jaringan, saat itu peneliti bersama aparat patroli laut sedang melakukan patroli dan singgah di Kuala maras untuk beristirahat. Peneliti melihat telepon genggam dan ternyata tidak ada

¹¹ Evy R. Syamsir, 2013. Danlanal Tarempa : Pengamanan Perbatasan NKRI Sangat Dinamis. *Antaraneews*. Tersedia di : <http://kepri.antaraneews.com/berita/26548/danlanal-tarempa-pengamanan-perbatasan-nkri-sangat-dinamis>. (diakses pada 2 desember 2015).

jaringan, setelah di tanya kepada warga ternyata di dana sudah 2 bulan tidak bisa berkominikasi dengan orang lain melalui telepon genggam.

Kecepatan kapal pengawas juga merupakan salah satu faktor yang menghambat keefektifan strategi Indonesia dalam menangani *illegal fishing* di kawasan laut Anambas, dari informasi yang peneliti dapatkan di lapangan dan peneliti diberi kesempatan juga untuk menaiki dan mengikuti patroli dengan KP.Ketipas, bahwasannya kapal ketipas ini kecepatan maksimalnya hanya 12 mil/jam sedangkan kecepatan kapal nelayan asing 15-16 mil/jam.

Kemudian juga ada permasalahan lain yakni kebocoran informasi saat akan melakukan patroli, hal ini sejalan dengan yang di katakan oleh Alpian (kasi pengawasan DKP Anambas), saat akan melakukan patroli secara rutin sering terjadi kebocoran informasi sehingga ketika kapal KKP berpatroli, sering kecolongan. untuk mengatasi bocornya informasi akan patroli, pihaknya telah meminta agar KKP sebelum masuk ke wilayah perairan atau sandar di wilayah KKA terlebih dahulu melakukan patroli, kalau kapal pengawas sudah sandar di Pelabuhan Jemaja dan Pelabuhan Anambas kemungkinan besar tidak akan ada kapal asing yang berada di perairan kita, mungkin mereka juga punya kaki tangan di wilayah kita jadi susah.¹²

¹² Dodo, 2012. Laut anambas masih rentan dengan illegal fishing. Batamtoday. 13 februari. Tersedia di : www.Batamtoday.com/berita11947-laut-anambas-masih-rentan-dengan-illegal-fishing. (diakses pada 21 desember 2014).

SIMPULAN

Penelitian ini membahas mengenai penanganan *illegal fishing* yang terjadi di kawasan laut Anambas. Anambas merupakan sebuah kabupaten yang terletak di laut China Selatan bagian barat Indonesia. Kabupaten Kepulauan Anambas terletak di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP 711) yang memiliki estimasi perikanan tangkap sekitar 1 juta ton/tahun. Letak yang strategis dan potensi yang dimiliki Anambas, membuatnya rentan terhadap pelanggaran wilayah kedaulatan Indonesia dari penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal fishing*). akibat *illegal fishing* yang terjadi di kawasan laut Anambas negara harus menanggung kerugian sebesar Rp.1 triliun setiap tahunnya.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori strategi. Strategi merupakan kamanpuan untuk menggunakan kekuatan sebagai alat dan sebagai ancaman. Dilihat dari kajian kekuatan militer, strategis menjadi jembatan antara kekuatan militer tersebut dengan pencapaian tujuan politik. Untuk menentukan efektifitas strategi militer yang digunakan sebuah negara/pemerintah dapat dilihat secara efektifitas politik dan efektifitas strategi itu sendiri.

Dalam kasus *illegal fishing* yang terjadi di kawasan laut Anambas, Strategi yang digunakan adalah patroli pengawasan yang dilakukan oleh beberapa lembaga seperti Bakorkamla, TNI-AL (Lanal Tarempa), Satker PSDKP Anambas, dan DKP Anambas serta masyarakat, belum menunjukkan keefektifan dalam menangani tindak *illegal fishing* oleh kapal nelayan asing.

Belum efektifnya strategi yang dilakukan oleh Indonesia ini dapat dilihat pada pelanggaran *illegal fishing* oleh kapal nelayan asing yang masih terjadi di kawasan laut Anambas sampai saat ini. juga dapat dilihat dari keadaan keamanan Anambas yang belum meningkat, seperti; masuknya kapal perang asing dan pembajakan, sehingga membuat masyarakat Anambas tidak aman, atau mengakibatkan belum sejahteranya masyarakat Anambas terutama para nelayan Anambas. hal ini menunjukkan tujuan politik dari strategi yang dilakukan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan dari tindakan *illegal fishing* di kawasan laut Anambas belum terwujud.

Ketidakefektifan strategi Indonesia menangani *illegal fishing* di kawasan laut Anambas, pada dasarnya di sebabkan oleh beberapa faktor diantaranya : kurangnya ketersediaan anggaran, kurangnya sarana dan prasarana pengawasan, kondisi alam, jaringan komunikasi dan faktor-faktor lainnya. Faktor-faktor diatas ini, jika di aplikasikan kepada strategi pengawasan laut yang digunakan Indonesia dalam menangani *illegal fishing*, akan mengalami lebih banyak permasalahan. Contohnya, dengan kurangnya ketersediaan anggaran maka akan mempengaruhi terhadap ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan jumlah hari untuk melakukan patroli di kawasan Anambas.

Berdasarkan efektifitas secara politik dalam sebuah strategi berhubungan dengan pencapaian tujuan politik yang telah di tetapkan oleh pemerintah yakni; Indonesia terbebas dari *illegal fishing* dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan serta

meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum tercapai. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya kegiatan *illegal fishing* yang terjadi di kawasan laut Anambas.

Tujuan politik yang tidak tercapai tersebut di akibatkan oleh kurangnya dukungan pemerintah Indonesia dalam memberantas *illegal fishing* dikawasan Anambas untuk membangun kekuatan pengawasan laut. kurangnya sumber dana untuk melakukan patroli membuat pengawasan laut tidak dapat dilakukan secara maksimal dalam waktu 1 tahunnya.

Berdasarkan efektifitas Secara strategi juga belum menunjukkan keefektifan dalam menangani *illegal fishing* di kawasan laut Anambas, hal ini didasarkan kepada kurangnya kemampuan atau kekuatan untuk mencapai tujuan politik yang telah ditentukan. Seperti, penentuan tujuan yang tidak memperhitungkan sarana yang ada. kurangnya kemampuan atau kekuatan dalam melakukan pengawasan di Anambas dapat dilihat dari jumlah kapal pengawas yang terbatas dibandingkan dengan luas laut yang harus di awasi. anggaran sedikit yang berakibat kepada kurangnya penyediaan bahan bakar minyak sehingga mempengaruhi banyaknya patroli laut dalam waktu setahun.

Selain itu, juga ada faktor lain yang mempengaruhi keefektifan strategi di kawasan laut Anambas seperti : pertama, kondisi alam dimana keadaan atau pun cuaca di laut tidak memungkinkan tim patroli pengawasan untuk menjalankan tugasnya. Kondisi yang dimaksud adalah di saat gelombang tinggi dan angin laut kencang. Kedua, Ketersediaan jaringan komunikasi, hal ini terutama bagi masyarakat

yang mungkin melihat adanya aktifitas *illegal fishing* di laut Anambas untuk melaporkan kepada petugas patroli yang memangku tugas dan fungsi pengawasan. Ketiga kecepatan kapal pengawas yang digunakan untuk mengejar kapal nelayan asing yang mungkin saja berusaha untuk melarikan diri. Dan keempat, kebocoran informasi dalam melakukan patroli sehingga hasil dari patroli tidak menghasilkan apapun.

Kesimpulan akhir, dalam upaya Indonesia menangani *illegal fishing* yang terjadi di laut Anambas masih belum optimal karena berbagai keterbatasan meliputi kapasitas, kapabilitas, peralatan dan perangkat dalam memaksimalkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di kawasan laut Anambas. Sedangkan untuk melihat ketidakefektifan strategi Indonesia menangani *illegal fishing* di kawasan laut Anambas, dapat dibuktikan dengan masih adanya tindakan *illegal fishing* yang terjadi sehingga belum meningkatkan keamanan kawasan laut Anambas dan berimbas kepada kesejahteraan masyarakat nelayan Anambas.

SARAN

Untuk meningkatkan hasil penanganan *illegal fishing* yang terjadi di kawasan laut Anambas, maka beberapa faktor yang menjadi penghambat keefektifan diatas harus di atasi dahulu. Terutama mengenai anggaran yang disediakan untuk melakukan patroli pengawasan laut, harus di sesuaikan dengan baik, setidaknya setiap hari ada satu kapal pengawas yang berpatroli di laut baik dari TNI-AL (Lanal Tarempa), DKP Anambas maupun Satker PSDKP Anambas. selanjutnya mengenai

sarana kapal pengawas harus di sesuaikan dengan luas lautan yang akan di awasi. Maksudnya adalah penambahan kapal pengawas. Kemudian juga harus ada kapal pengawas yang besar, dimana kapal ini dapat melakukan pengawasan pada situasi dan kondisi apapun. Perbaiki jaringan komunikasi sebagai sarana pelaporan dari masyarakat nelayan Anambas jika melihat kegiatan pencurian ikan di laut Anambas.

Daftar Pustaka

- Jill, S., & Lloyd, P., 2009. *Hubungan Internasional Perspektif dan Tema*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Theodore, A.C., & James, W., 1999. *Pengantar Hubungan Internasional Keadilan dan Power*. Bandung: Putra Abardin.
- Viktor, Trumen., 2013. *Kebijakan pemerintahan Indonesia Menangani Dampak (Illegal Fishing) Nelayan Malaysia Terhadap Produksi Perikanan Indonesia 2007-2011*. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Keputusan Menteri Kelautan Dan perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.45/MEN/2011 Tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan negara Republik Indonesia.
- Anambaskap.go.id.
- DKP.ANAMBAS.co.id.
- DKP.KEPRI.co.id.
- Google : Peta Citra Satelit Google Earth Sistem WGS 84, Zona UTM North 48.
- Berita daerah, 2010. Lawan KRI kapal nelayan Thailand tenggelam. *JPNN*, 12 mei.

- Tersedia di :
jppn.com/news.php?id=63709.
 [di akses pada 13 oktober 2014]. Evy R. Syamsir, 2013. Danlanal Tarempa : Pengamanan Perbatasan NKRI Sangat Dinamis. *Antaraneews*. 6 Oktober. Tersedia di : <http://kepri.antaranews.com/berita/26548/danlanal-tarempa-pengamanan-perbatasan-nkri-sangat-dinamis>. [di akses pada 2 desember 2014].
- Dodo, 2012. Laut anambas masih rentan dengan illegal fishing. *Batamtoday*. 13 februari. Tersedia di : www.Batamtoday.com/berita/1947-laut-anambas-masih-rentan-dengan-illegal-fishing. [diakses pada 21 desember 2014].
- Evy R. Syamsir, 2013. Danlanal Tarempa : Pengamanan Perbatasan NKRI Sangat Dinamis. *Antaraneews*. 6 Oktober. Tersedia di : <http://kepri.antaranews.com/berita/26548/danlanal-tarempa-pengamanan-perbatasan-nkri-sangat-dinamis>. [di akses pada 2 desember 2014].
- Ferry Santoso, 2009. KEPRI, Ladang Empuk Ekploitsi Alam. *Infokorupsi.com*. 14 Agustus. Tersedia di: <http://infokorupsi.com/id/apbn-apbd.php?ac=beritai=545&d=85>. [diakses pada 3 november 2014].
- Haratua, S., 2014. Nelayan Tuntut Ketegasan Pemerintahan, *Haluan Kepri*.
- Haratua, S., 2014. MT Galuh Pasukan Dibajak. *Haluan Kepri*.
- Kabupaten Kepulauan anambas, 2014. *Gerbang Perak Menuju Mas*. (PDF). Tersedia di : <http://parekraf.go.id/%2Foldlook%2Fattachments%2F24-2078381286-0.pdf&ei=xyxXVIO0DM-zuAS-koLgAQ&usg=AFQjCNEWS5HHpE6vZCmWrgvzxw1GEm-0rg>. [Di akses pada 3 November 2014].